



PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN DAIRI**

## EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi dalam mencapai sasaran strategis yang disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Dairi seperti yang tertuang dalam Perubahan Kabupaten Dairi RPJMD 2019-2024, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi SKPD pendukung Misi ke 4 Pembangunan Kabupaten Dairi yakni ***“Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan clean government (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”***.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi Tahun 2022 disusun melalui pengukuran indikator kinerja Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja dalam dokumen-dokumen perjanjian kinerja dengan hasil pengukuran kinerja. Berikut Realisasi pencapaian target sebagaimana di bawah ini :

### Pencapaian Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya penyelesaian K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan)	5%	5,5%	110%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat SAKIP	B	Masih menunggu hasil Reviu Inspektorat	-

Meningkatnya penyelesaian K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) serta Perlindungan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) dapat dicapai sesuai dengan formula indikator kinerja yaitu Jumlah kasus Pelanggaran Ketentraman, ketertiban umum serta keindahan (K3) Tahun 2021 sebanyak 116 Kasus dikurangi Jumlah Kasus pelanggaran Ketentraman, ketertiban umum serta keindahan (K3) Tahun 2022 sebanyak 110 Kasus, dibagi dengan Jumlah Kasus Pelanggaran Ketentraman, ketertiban umum serta keindahan (K3) 2022 sebanyak 110 kasus, sehingga diperoleh hasil sebesar 5,5 %.

Indikator Kinerja Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) sebesar 110% dapat dicapai dimana target kinerja Tahun 2022 sebesar 5% dan dapat terealisasi sebesar 5,5%.

**Outcome** yang diperoleh dari Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) yaitu meningkatnya ketertiban, ketentraman masyarakat serta keindahan di Kabupaten Dairi.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dengan Indikator Kinerja Predikat SAKIP masih menunggu hasil Evaluasi Inspektorat.

**Outcome** yang diperoleh dari Predikat SAKIP terlaksananya implementasi tata kelola pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi.

#### Pencapaian Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Program Tahun 2022

No.	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	100%	100%	100%
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	65%	95%	146%
		Persentase penegakan produk hukum daerah	85%	85%	100%

Indikator Kinerja Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar sebesar 100% dapat dicapai dimana target kinerja Tahun 2022 sebesar 100% dan dapat terealisasi sebesar 100%.

**Outcome** yang diperoleh dari Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar yaitu terlaksananya pengelolaan administrasi secara efektif dan efisien sesuai standar dan prosedur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi.

Indikator Kinerja Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 146% dapat dicapai dimana target kinerja Tahun 2022 sebesar 65% dan dapat terealisasi sebesar 95%.

**Outcome** yang diperoleh dari tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yaitu meningkatnya ketertiban, ketentraman masyarakat serta keindahan di Kabupaten Dairi serta melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan, kenyamanan, ketentraman serta keindahan melalui Satlinmas Desa, Satlinmas Kelurahan, Satlinmas Kecamatan dan Satlinmas Kabupaten.

Indikator Kinerja Persentase penegakan produk hukum daerah sebesar 100% dapat dicapai dimana targetkinerja Tahun 2022 sebesar 85% dan dapat terealisasi sebesar 85%.

**Outcome** yang diperoleh dari Persentase penegakan produk hukum daerah yaitu meningkatnya PAD (pendapatan asli daerah) Kabupaten Dairi melalui ketaatan masyarakat dalam mengurus ijin mendirikan bangunan/PBG (persetujuan bangunan gedung), ijin usaha, ijin reklame/baliho, ijin pendirian tower/menara serta badan usaha yang wajib membayar retribusi daerah.

Dalam Pencapaian Kinerja Tahun 2022 ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi masih banyak dijumpai berbagai hambatan – hambatan dalam pelaksanaan tugas dalam mencapai target kinerja yaitu :

1. Koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan Operasi sudah dilaksanakan tetapi hasil belum maksimal;
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas Penertiban dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat dan Tenaga fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Belum maksimalnya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sedangkan luas wilayah sangat luas;
4. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja jika dibandingkan dengan luas wilayah kerja yang begitu luas belum memenuhi.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas petunjuk dan RahmatNya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yaitu sebagai media menyampaikan pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan juga sebagai bahan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu sudah menjadi sebuah kewajiban bagi setiap instansi pemerintah daerah untuk melaporkan pertanggungjawabannya sebagai wujud peran aktif evaluasi kinerja instansi pemerintah yang lebih baik, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bagian integral dari siklus sistem akuntabilitas kinerja yang utuh.

Kami menyadari bahwa hasil kerja kami yang sudah kami anggap maksimal tentunya tidak luput dari kekurangan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Untuk itu kami mengharapkan kritikan, saran dan masukan yang bersifat membangun demi kebaikan bersama. Semoga LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi ini dapat bermanfaat.

Sidikalang, 30 Januari 2023



Drs. JUNIHARDI D.R. SIREGAR, MM  
REMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196906031990091001

## DAFTAR ISI

<b>EXECUTIVE SUMMARY</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud, Tujuan dan Permasalahan Utama .....	1
C. Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
D. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Dairi .....	3
E. Permasalahan Utama ( Strategic Issued ) .....	7
<b>BAB II           PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b> .....	<b>9</b>
A. Perencanaan Strategis.....	9
B. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Dairi .....	9
C. Sasaran Strategis .....	10
D. Penetapan Kinerja .....	10
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	14
<b>BAB III           AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>16</b>
A. Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2022 .....	16
B. Realisasi Anggaran Tahun 2022 .....	38
<b>BAB VII           PENUTUP</b> .....	<b>40</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pelaksanaan tugas serta pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Perlindungan Masyarakat yang pada prinsipnya merupakan kewajiban Kepala Satuan beserta jajarannya. Kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi memiliki konsekuensi dan tanggungjawab yang tidak ringan. Hal terpenting dari latar belakang penyusunan LKIP dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi Tahun 2022 selain memenuhi tuntutan untuk akuntabilitas juga adanya keinginan yang kuat untuk mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata pemerintahan yang baik.

Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan bagi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate.

Untuk kepentingan penilaian kinerja instansi pemerintah, telah terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Dengan dilatarbelakangi aturan hukum tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi membuat pertanggungjawaban dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Dairi serta Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi.

### **B. MAKSUD, TUJUAN, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi. Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk :

1. Memberikan informasi capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.
2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi.
3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa mendatang. Adapun isu strategis yang dapat diidentifikasi adalah peningkatan kualitas ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Permasalahan utama dalam pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada masih rendah serta sarana dan prasarana pendukung yang belum maksimal.

### **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Perlindungan Masyarakat, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. Pelaksanaan Administrasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya



## **D. PROFIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DAIRI**

### **1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab Dairi**

Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dengan jabatan Eselon II/b dan membawahi 1 (satu) orang pejabat struktural Eselon III/a, 3 (tiga) orang pejabat struktural Eselon III/b dan 8 (delapan) orang pejabat struktural Eselon IV/a. Adapun susunan jabatan struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretaris, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
  - Kepala Sub Bagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan;
  - Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
- c. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahi 2 (dua) Seksi yaitu:
  - Kepala Seksi Pembinaan Ketentraman Ketertiban Umum dan Kerjasama; dan
  - Kepala Seksi Pengamanan, Protokol dan Objek Vital.
- d. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, membawahi 2 (dua) Seksi yaitu :
  - Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
  - Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan.
- e. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi 2 (dua) Seksi yaitu :
  - Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
  - Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat.

### **2. Sumber Daya Manusia**

#### **a. Komposisi Pegawai**

Secara keseluruhan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi per 30 Desember 2022 adalah sebanyak 30 orang, dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel 1.1

**Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi**

( per Desember 2022 )

No	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1 Orang	-	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang	-	1 Orang
	a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan	-	1 Orang	1 Orang
	b. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset	-	1 Orang	1 Orang
	c. Staf sekretariat	2 Orang	-	2 Orang
3	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Orang	-	1 Orang
	Kepala Seksi Pembinaan Ketentraman Ketertiban Umum dan Kerjasama	1 Orang	-	1 Orang
	Kepala Seksi Pengamanan, Protokol dan Objek Vital	1 Orang	-	1 Orang
	Petugas Keamanan	5 Orang	1 Orang	6 Orang
4	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	1 Orang	-	1 Orang
	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	1 Orang	-	1 Orang
	Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan	-	1 Orang	1 Orang
	Petugas Keamanan	3 Orang	1 Orang	4 Orang
5	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	1 Orang	-	1 Orang
	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	1 Orang	-	1 Orang
	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	1 Orang	-	1 Orang
	Pranata Perlindungan Masyarakat	4 Orang	1 Orang	5 Orang
<b>T o t a l</b>		<b>24 orang</b>	<b>6 orang</b>	<b>30 orang</b>

*Tabel 1.2*  
**Jumlah Pegawai Menurut Pangkat Dan Golongan**  
 ( per Desember 2022 )

No.	Pangkat	Gol. Ruang	Jabatan					Jumlah
			Kepala Satuan	Sekretariat	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	Bidang Perlindungan Masyarakat	
1	Pembina Muda Utama	IV c	1 Orang	-	-	-	-	1 Orang
2	Pembina	IV a	-	1 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	4 Orang
3	Penata Tingkat I	III d	-	2 Orang	1 Orang	2 Orang	1 Orang	6 Orang
4	Penata	III c	-	-	-	-	1 Orang	1 Orang
5	Penata Muda Tingkat I	III b	-	-	2 Orang	-	1 Orang	3 Orang
6	Penata Muda	III a	-	1 Orang	2 Orang	3 Orang	3 Orang	9 Orang
7	Pengatur Tingkat I	II d	-	-	1 Orang	-	-	1 Orang
8	Pengatur	II c	-	1 Orang	2 Orang	1 Orang	1 Orang	5 Orang
9	Pengatur Muda Tingkat I	II b	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>			<b>1 Orang</b>	<b>5 Orang</b>	<b>9 Orang</b>	<b>7 Orang</b>	<b>8 Orang</b>	<b>30 Orang</b>

### b. Pegawai menurut tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja, adalah sebagai berikut :

- 2 orang, berpendidikan S-2;
- 8 orang, berpendidikan S-1;
- 20 orang, berpendidikan SLTA/sederajat;

Gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Satuan Polisi Pamong Praja menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

*Tabel 1.3*

#### ***Jumlah Pegawai Menurut Latar belakang Pendidikan Terakhir***

( per Desember 2022 )

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	Pendidikan				Jumlah
	S-2	S-1	SLTA/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	
Kepala Satuan	1 Orang	-	-	-	1 Orang
Sekretariat	-	3 Orang	2 Orang	-	5 Orang
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Orang	1 Orang	7 Orang	-	9 Orang
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	-	2 Orang	5 Orang	-	7 Orang
Bidang Perlindungan Masyarakat	-	2 Orang	6 Orang	-	8 Orang
<b>T o t a l</b>	<b>2 Orang</b>	<b>8 Orang</b>	<b>20 Orang</b>	<b>-</b>	<b>30 Orang</b>

### 3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

#### a. Bangunan Kantor :

Bangunan Gedung kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi adalah bangunan permanen/beton yang kondisinya sudah layak untuk ditempati.

#### b. Kendaraan Dinas

Kendaraan roda 4 (empat), sebanyak 4 (empat) unit yang terdiri dari 1 (satu) unit untuk Kendaraan Dinas Kepala Satuan, 1 (satu) unit untuk Kendaraan Dinas Pengendalian Massa (Dalmas), 1(satu) unit untuk Kendaraan Penegakan Perda dan Perkada, 1 (satu) unit untuk Kendaraan Dinas Patroli Wilayah ( Patroli ). Dan Kendaraan roda 2 (dua), sebanyak 6 (enam) unit.

c. Fasilitas Lainnya

Sarana lain untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedinasan pada Satuan Polisi Pamong Praja berupa, komputer PC sebanyak 6 (enam) unit, laptop sebanyak 7 (tujuh) unit, pakaian huru-hara, tameng, pelindung kepala (helm), tongkat (pentungan), kamera 1 (satu) unit, 3 (tiga) unit rak arsip, 8 (delapan) unit filling kabinet, 6 (enam) unit kursi putar, 143 (seratus empat puluh tiga) unit kursi rapat, 1 (satu) unit kursi tunggu, 2 (dua) unit tempat tidur busa, 1 (satu) unit proyektor, 2 (dua) unit mesin genset, 1 (satu) unit speaker, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput, 1 (satu) buah matras dan 1 (satu) buah samsak.

**E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)**

Sejalan dengan upaya pembangunan Kabupaten Dairi, maka stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Dairi menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Namun demikian, masih perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan sehingga tercapai kondisi yang lebih baik. Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi demikian apabila tidak dapat diatasi secara baik dalam kurun waktu tertentu akan berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang akhirnya akan menghambat proses pembangunan di wilayah Kabupaten Dairi.

Kabupaten Dairi dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tuntutan masyarakat tentu saja mengharapkan adanya perubahan. Permasalahan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Dairi secara umum hampir sama dengan daerah lainnya antara lain :

1. Koordinasi antar instansi yang masih lemah;
2. Ketaatan masyarakat terhadap Perda dan Perkada sangat rendah;
3. Peralatan dan perlengkapan operasional belum memadai;
4. Kurangnya sosialisasi tentang Perda/ Perkada ke masyarakat;
5. Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga kemandirian lingkungan;
6. Kurangnya peningkatan keterampilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah;
7. Kurangnya peningkatan kapasitas bagi Jabatan Fungsional;
8. Anggota LINMAS Desa tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan;
9. Belum maksimalnya pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
10. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana yang belum memadai;
11. Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang belum memadai;
12. Penataan Pasar yang belum maksimal sehingga meningkatnya pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat;
13. Penggunaan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;

14. Kegiatan masyarakat yang berpotensi/telah merusak lingkungan;
15. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menjaga kebersihan;
16. Penyakit masyarakat seperti perjudian, minuman keras, prostitusi dan penggunaan narkoba;
17. Kenakalan remaja dan pelajar;
18. Jumlah Pos Kamling yang belum memadai.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi sebagai suatu organisasi atau lembaga publik mempunyai Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk Tahun 2019 – 2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang yang ada dan kendala yang mungkin akan timbul.

Sesuai dengan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi telah menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, terdapat perubahan pada Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi untuk tahun 2022, meskipun tidak ada perubahan terkait nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, indikator sasaran.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis Instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global.

#### **B. RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DAIRI**

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang dimotori oleh tim penyusun dan diketahui oleh Kepala Satuan. Rencana Strategis yang disusun merupakan alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban selama 5 (lima) tahun dan untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif pemerintahan.

Disamping itu Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi agar lebih terarah dan terjamin dalam pencapaian sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang bagi manajemen Satuan Polisi Pamong Praja. Rencana Strategis (RENSTRA) dipandang sebagai :

1. Alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Gambaran visi, misi, persepsi, interpretasi serta strategi satuan untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi;

3. Alat untuk memacu dan memotivasi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan.
4. Sebagai Alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik pencapaian program dan kegiatan.

Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan dan kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan Strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Dairi seperti yang tertuang dalam Perubahan Kabupaten Dairi RPJMD 2019-2024, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi SKPD pendukung Misi ke 4 Pembangunan Kabupaten Dairi yakni ***“Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan clean government (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”***.

### **C. SASARAN STRATEGIS**

Dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Meningkatnya penyelesaian Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3).

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, maka diperlukan indikator kinerja untuk mengukur seberapa besar target akan dicapai yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Predikat AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi;
2. Persentase penyelesaian kasus Ketertiban, ketentraman dan Keindahan (K3).

### **D. PENETAPAN KINERJA**

Untuk menunjang keberhasilan sasaran tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi membuat penetapan kinerja sebagaimana tabel berikut :



*Tabel 2.1*  
**Penetapan Kinerja**  
**Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah**

S K P D : Satuan Polisi Pamong Praja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Predikat AKIP Satpol PP	B	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standard	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.677.794.745
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000
					a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000
					b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.174.213.018
					a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.174.213.018
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000
					a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>176.810.000</b>
					a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	146.810.000
b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000					

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>515.698.700</b>
				a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.457.900
				b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.733.400
				c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.569.400
				d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.680.000
				e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	414.258.000
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>46.820.000</b>
				a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.320.000
				b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.500.000
				Penyediaan Jasa Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	<b>2.535.257.484</b>
				a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.500.000
				b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.518.757.484
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<b>198.995.543</b>
				a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	173.585.543
				b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.340.000
				c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.070.000

Meningkatnya penyelesaian ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3)	Persentase Penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3)	5%	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	65%	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum / Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.401.103.800
					Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>905.993.300</b>
					a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	504.452.500
					b. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	199.999.950
					c. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	52.242.850
					d. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban umum	149.298.000
			85%	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	495.110.500	
			Persentase penegakan produk hukum daerah	a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	119.999.700	
				b. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	375.110.800	

## E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Rencana Aksi, IKU, dan anggaran atau DPA.

Sesuai dengan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja juga telah menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022. Berdasarkan Perubahan Rencana Kerja tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi melaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja. Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi disusun sebagai berikut :

**TABEL 2.2**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN DAIRI**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelesaian K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan)	5%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat SAKIP	B

**TABEL 2.3**  
**PERJANJIAN KINERJA PROGRAM**

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	100%

2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	65%
		Persentase penegakan produk hukum daerah	85%

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2022**

**1. Pencapaian Kinerja Sasaran**

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang,

Capaian Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**TABEL 3.1**

Pencapaian Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2022
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya penyelesaian K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan)	Jumlah kasus Pelanggaran Ketentraman, ketertiban umum serta keindahan (K3) Tahun 2021 dikurangi Jumlah Kasus pelanggaran Ketentraman, ketertiban umum serta keindahan (K3) Tahun 2022 dibagi dengan Jumlah Kasus Pelanggaran Ketentraman, ketertiban umum serta keindahan (K3) 2022	5,5%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat SAKIP	Hasil Evaluasi Inspektorat	<b>B</b>

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa :

- a. Meningkatnya penyelesaian K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) serta Perlindungan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) dapat dicapai sesuai dengan formula indikator kinerja yaitu Jumlah kasus

Pelanggaran Ketentraman, ketertiban umum serta keindahan (K3) Tahun 2021 sebanyak 116 Kasus dikurangi Jumlah Kasus pelanggaran Ketentraman, ketertiban umum serta keindahan (K3) Tahun 2022 sebanyak 110 Kasus, dibagi dengan Jumlah Kasus Pelanggaran Ketentraman, ketertiban umum serta keindahan (K3) 2022 sebanyak 110 kasus, sehingga diperoleh hasil sebesar 5,5 %.

**TABEL 3.2**  
**Jumlah Kasus pelanggaran Ketentraman, ketertiban umum serta**  
**keindahan (K3) Tahun 2021 dan Tahun 2022**

No	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2022	
1	Penertiban Pasar Sidikalang, tigalingga, Sumbul dan Sitinjo	3	Kasus	4	Kasus
2	Pelaksanaan patroli wilayah dan penertiban hiburan malam	37	Kasus	10	Kasus
3	Pengamanan Aset Daerah	14	Kasus	2	Kasus
4	Pengawasan dan Pengamanan terhadap Kepala Daerah, Pejabat VIP dan VVIP	30	Kasus	28	Kasus
5	Penertiban Gelandangan Pengemis	22	Kasus	11	Kasus
6	Pengamanan Unjuk Rasa	3	Kasus	7	Kasus
7	Operasi Tertib siswa	0	Kasus	3	Kasus
8	Pengamanan Penertiban Lainnya	7	Kasus	45	Kasus
<i>Jumlah</i>		<i>116</i>	<i>Kasus</i>	<i>110</i>	<i>Kasus</i>

**Outcome** yang diperoleh dari Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) yaitu meningkatnya ketertiban, ketentraman masyarakat serta keindahan di Kabupaten Dairi.

- b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dengan Indikator Kinerja Predikat SAKIP masih menunggu hasil Evaluasi Inspektorat.

**Outcome** yang diperoleh dari Predikat SAKIP terlaksananya implementasi tata kelola pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi.

Capaian Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi pada Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut :

**TABEL 3.3**  
**Pencapaian Kinerja Program**

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2022
1	2	3		4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	Jumlah program penunjang sesuai standar dibagi Jumlah Program yang tersedia dikali 100%	100%
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	Jumlah kasus ketertiban, ketenteraman dan keindahan yang dapat diselesaikan tahun 2022 dibagi dengan jumlah kasus ketertiban, ketenteraman dan keindahan yang ada tahun 2022, dikali 100%	95%
		Persentase penegakan produk hukum daerah	jumlah pelanggaran produk hukum daerah yang diselesaikan dibagi dengan Jumlah Pelanggaran Produk hukum daerah yang ada tahun 2022 dikali 100%	85%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa :

- a. Indikator Kinerja Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar dapat dicapai sesuai dengan formula indikator kinerja yaitu Jumlah program penunjang sesuai standar sebanyak 1 program dibagi Jumlah Program yang tersedia sebanyak 1 program dikali 100% yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sehingga hasil yang dicapai sebesar 100%.

**Outcome** yang diperoleh dari Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar yaitu terlaksananya pengelolaan administrasi secara efektif dan efisien sesuai standar dan prosedur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi.

- b. Indikator Kinerja Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dapat dicapai sesuai dengan formula indikator kinerja yaitu Jumlah kasus ketertiban, ketenteraman dan keindahan yang dapat diselesaikan tahun 2022 sebanyak 104 kasus dibagi dengan jumlah kasus



ketertiban, ketentraman dan keindahan yang ada tahun 2022 sebanyak 110 kasus, dikali 100% sehingga hasil yang dicapai sebesar 95%.

**TABEL 3.4**

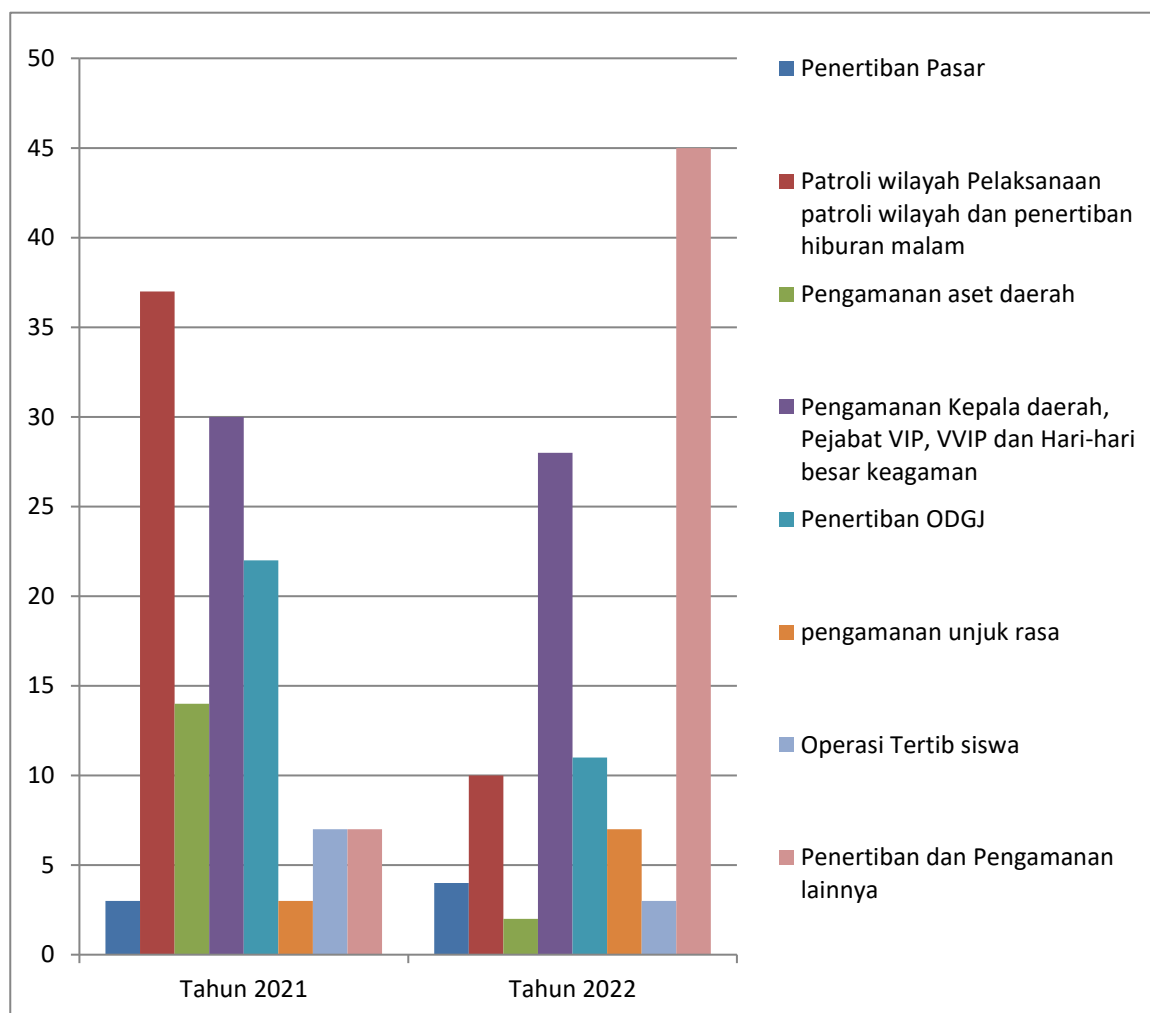
**Jumlah kasus ketertiban, ketentraman dan keindahan Tahun 2022 dan yang dapat diselesaikan tahun 2022**

No	Uraian	Jumlah kasus ketertiban, ketentraman dan keindahan	
		Tahun 2022	Yang dapat diselesaikan Tahun 2022
1	Penertiban Pasar Sidikalang, Tigalingga, Sumbul, Sitinjo	4 Kasus	3 Kasus
2	Pelaksanaan patroli wilayah dan penertiban hiburan malam	10 Kasus	10 Kasus
3	Pengamanan Aset Daerah	2 Kasus	2 Kasus
4	Pengawasan dan Pengamanan terhadap Kepala Daerah, Pejabat VIP dan VVIP	28 Kasus	28 Kasus
5	Penertiban Gelandangan Pengemis	11 Kasus	11 Kasus
6	Pengamanan Unjuk Rasa	7 Kasus	7 Kasus
7	Operasi Tertib siswa	3 Kasus	0 Kasus
8	Pengamanan Penertiban Lainnya	45 Kasus	45 Kasus
<i>Jumlah</i>		<i>110 Kasus</i>	<i>106 Kasus</i>

**Outcome** yang diperoleh dari tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yaitu meningkatnya ketertiban, ketentraman masyarakat serta keindahan di Kabupaten Dairi serta melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan, kenyamanan, ketentraman serta keindahan melalui Satlinmas Desa, Satlinmas Kelurahan, Satlinmas Kecamatan dan Satlinmas Kabupaten.

**Diagram 3.1**

**Pelaksanaan Pengamanan, Penertiban serta Pengawalan pada Tahun 2021 dan 2022**



- c. Indikator Kinerja Persentase penegakan produk hukum daerah dapat dicapai sesuai dengan formula indikator kinerja yaitu jumlah pelanggaran produk hukum daerah yang diselesaikan tahun 2022 sebanyak 368 kasus dibagi dengan Jumlah Pelanggaran Produk hukum daerah tahun 2022 sebanyak 433 kasus dikali 100% sehingga hasil yang dicapai sebesar 85%.

TABEL 3.5  
**Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Dan  
 Peraturan Kepala Daerah Tahun 2022**

No	Uraian	Jumlah Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran yang diselesaikan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Himbauan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	183	154
2	Himbauan Ijin Usaha	158	122
3	Penertiban Reklame	10	10
4	Penertiban Menara Tower	25	25
5	Pendampingan Penagihan Pajak Daerah Bersama Tim dari Badan Pendapatan Daerah di Kabupaten Dairi	57	57
<i>Jumlah</i>		<b>433</b>	<b>368</b>

**Outcome** yang diperoleh dari Persentase penegakan produk hukum daerah yaitu meningkatnya PAD (pendapatan asli daerah) Kabupaten Dairi melalui ketaatan masyarakat dalam mengurus ijin mendirikan bangunan/PBG (persetujuan bangunan gedung), ijin usaha, ijin reklame/baliho, ijin pendirian tower/menara serta badan usaha yang wajib membayar retribusi daerah.

## 2. Analisa Capaian Kinerja

Analisa Atas Pencapaian Sasaran Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab. Rincian Analisa capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pencapaian Kinerja Sasaran yang diperoleh pada Tahun 2022 dengan membandingkan Target Kinerja Tahun Anggaran 2022 dengan Realisasi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.6**

Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja Sasaran  
Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya penyelesaian K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan)	5%	5,5%	110%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat SAKIP	B	B	100%

Indikator Kinerja Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) sebesar 110% dapat dicapai dimana target kinerja Tahun 2022 sebesar 5% dan dapat terealisasi sebesar 5,5%.

**TABEL 3.7**

Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja  
Sasaran Indikator Kinerja Program

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	100%	100%	100%
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	65%	95%	146%
		Persentase penegakan produk hukum daerah	85%	85%	100%

Indikator Kinerja Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar sebesar 100% dapat dicapai dimana target kinerja Tahun 2022 sebesar 100% dan dapat terealisasi sebesar 100%.

Indikator Kinerja Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 146% dapat dicapai dimana target kinerja Tahun 2022 sebesar 65% dan dapat terealisasi sebesar 95%.

Indikator Kinerja Persentase penegakan produk hukum daerah sebesar 100% dapat dicapai dimana target kinerja Tahun 2022 sebesar 85% dan dapat terealisasi sebesar 85%.

- b. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2022 dengan Realisasi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.8**

Perbandingan Realisasi Pencapaian Kinerja Sasaran  
Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 dan Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya penyelesaian K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan)	5%	5,5%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat SAKIP	CC	B

Capaian Kinerja Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) pada Tahun 2021 sebesar 5% dan pada Tahun 2022 Capaian Kinerja Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) meningkat menjadi 5,5%.

Capaian Kinerja Predikat SAKIP pada Tahun 2021 bernilai CC dan pada Tahun 2022 Capaian Kinerja Predikat SAKIP meningkat menjadi B.

**TABEL 3.9**  
**Perbandingan Realisasi Pencapaian Kinerja**  
**Sasaran Indikator Kinerja Program Tahun 2021 dan Tahun 2022**

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022
1	2	3	4	5
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	100%	100%
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	60%	95%
		Persentase penegakan produk hukum daerah	80%	85%

Capaian Kinerja Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar pada Tahun 2021 sebesar 100% sama dengan Capaian Kinerja Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar pada Tahun 2022 sebesar 100%.

Capaian Kinerja Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 pada Tahun 2021 sebesar 65% pada Tahun 2022 Capaian Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar meningkat menjadi 95%.

Capaian Kinerja Persentase penegakan produk hukum daerah pada Tahun 2021 sebesar 80% pada Tahun 2022 Capaian Persentase penegakan produk hukum daerah menjadi 85%.

- c. Perbandingan Realisasi kinerja sampai Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**TABEL 3.10**

Perbandingan Realisasi kinerja sampai Tahun 2022 dengan target jangka menengah  
Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir RPJMD		Realisasi Kinerja Tahun 2021 s/d 2022		Tingkat Kemajuan
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya penyelesaian K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan)	20%	100%	10,5%	110%	53 %
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat SAKIP	BB		B		50%

Realisasi Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) dari tahun 2021 sampai Tahun 2022 sebesar 10,5%, Bila dibandingkan dengan target Akhir RPJMD sebesar 20%, Realisasi Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) mengalami tingkat kemajuan sebesar 53%.

Realisasi Predikat SAKIP dari tahun 2021 sampai Tahun 2022 Bernilai B, bila dibandingkan dengan target Akhir RPJMD bernilai BB%, realisasi kinerja Predikat SAKIP mengalami tingkat kemajuan sebesar 50%.

**TABEL 3.11**

Perbandingan Realisasi kinerja sampai Tahun 2022 dengan target jangka menengah  
Indikator Kinerja Program

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir RPJMD		Realisasi Kinerja Tahun 2021 s/d 2022		Tingkat Kemajuan
			4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100 %
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	75%	100%	95%	100%	127%
		Persentase penegakan produk hukum daerah	95%	100%	85%	100%	89%

Realisasi kinerja dari indikator Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar dari tahun 2021 sampai Tahun 2022 sebesar 100%, bila dibandingkan dengan target Akhir RPJMD sebesar 100% realisasi kinerja Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar mengalami tingkat kemajuan sebesar 100%.

Realisasi kinerja dari indikator Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dari tahun 2021 sampai Tahun 2022 sebesar 95%, bila dibandingkan dengan target Akhir RPJMD sebesar 75% realisasi kinerja persentase Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mengalami tingkat kemajuan sebesar 127%.

Realisasi kinerja dari indikator Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar dari tahun 2021 sampai Tahun 2022 sebesar 95%, bila dibandingkan dengan target Akhir RPJMD sebesar 85% realisasi kinerja persentase penanganan pelanggaran peraturan daerah mengalami tingkat kemajuan sebesar 89%.

d. Permasalahan dan Solusi Yang dilakukan

Dalam Penyusunan LKIP Tahun 2022 ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi masih banyak dijumpai berbagai hambatan – hambatan dalam pelaksanaan tugas dalam mencapai target kinerja yaitu :

1. Koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan Operasi sudah dilaksanakan tetapi hasil belum maksimal;
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas Penertiban dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat dan Tenaga fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Belum maksimalnya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sedangkan luas wilayah sangat luas;
4. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja jika dibandingkan dengan luas wilayah kerja yang begitu luas belum memenuhi.

Dari Permasalahan yang dijumpai tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi melakukan beberapa Solusi yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan Operasi melalui telaah staf untuk pembahasan pelaksanaan tugas.
2. Mengusulkan Penambahan Sarana dan Prasarana serta pengajuan tenaga Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Pembentukan Satlinmas se Kabupaten Dairi di 15 Kecamatan 106 desa dan akan dibentuk lagi Satlinmas di 55 Desa dan 8 Kelurahan di Tahun 2023.
4. Mengusulkan penambahan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Akan tetapi masih ada beberapa solusi yang belum dapat dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di Tahun 2022 ini yaitu ;



1. Perlu adanya Penindakan Yustisial terhadap pelanggar Peraturan Daerah oleh PPNS
2. Pengadaan Kendaraan dinas lapangan yang sangat membantu untuk pelaksanaan tugas.
3. Barak Personil yang digunakan sebagai posko kesiagaan dalam tugas pengamanan mengingat pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dituntut kesiagaan dalam penanganan ketentraman dan ketertiban umum.

**e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran**

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Berikut disajikan tabel penggunaan sumber daya anggaran per sasaran pembangunan dan sasaran kinerja program.

**Tabel 3.12**

**Alokasi Per Sasaran Pembangunan**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Meningkatnya penyelesaian Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	Persentase Penurunan pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	1.401.103.800
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Predikat AKIP Satpol PP	6.677.794.745

**Tabel 3.13**

**Alokasi Per Sasaran Kinerja Program**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standard	6.677.794.745
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 ( Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	905.993.300
	Persentase penegakan produk hukum daerah	495.110.500

2. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Berikut disajikan tabel perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran per sasaran pembangunan dan sasaran kinerja program.

**Tabel 3.14**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.**  
**Indikator Kinerja Utama**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Meningkatnya penyelesaian Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	Persentase Penurunan pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	5%	5,5%	110%	1.401.103.800	1.278.187.900	93%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Predikat AKIP Satpol PP	B		100%	6.677.794.745	6.386.065.646	96%

Capaian sasaran meningkatnya penyelesaian ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) dengan indikator persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) berdasarkan anggaran yang ditetapkan dibandingkan dengan realisasi yang terlaksana sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) dimana target dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 1.401.103.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.278.187.900,-

Capaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan indikator Predikat AKIP Satpol PP berdasarkan anggaran yang ditetapkan dibandingkan dengan realisasi yang terlaksana sebesar 96% (sembilan puluh enam persen) dimana target dana yang dibutuhkan sebesar Rp.6.677.794.745,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.386.065.646,-

**Tabel 3.15**  
**Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.**  
**Indikator Kinerja Program**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standard	100%	100%	100%	6.677.794.745	6.386.065.646	96%
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	65%	95%	146%	905.993.300	830.964.400	96%
	Persentase penegakan produk hukum daerah	85%	85%	100%	495.110.500	447.223.500	90%

Capaian sasaran program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan indikator persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standard berdasarkan anggaran yang ditetapkan dibandingkan dengan realisasi yang terlaksana sebesar 96% (sembilan puluh tiga persen) dimana target dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 6.677.794.745,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.386.065.646,-

Capaian sasaran program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) berdasarkan anggaran yang ditetapkan dibandingkan dengan realisasi yang terlaksana sebesar 96% (sembilan puluh enam persen) dimana target dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 905.993.300,- dan terealisasi sebesar Rp. 830.964.400,- .

Capaian sasaran program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator persentase penegakan produk hukum daerah berdasarkan anggaran yang ditetapkan dibandingkan dengan realisasi yang terlaksana sebesar 90% (sembilan puluh enam persen) dimana target dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 495.110.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 447.223.500,- .

**f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.**

Berikut disajikan tabel efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja.

**Tabel 3.16**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Dibandingkan Dengan Capaian Kinerja**  
**Indikator Kinerja Utama**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% Capaian	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>6</i>	<i>7</i>
Meningkatnya penyelesaian Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	Persentase Penurunan pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	110%	93%	17 %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Predikat AKIP Satpol PP	100%	96%	4 %

Capaian sasaran meningkatnya penyelesaian ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) dengan indikator persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) sebesar 110% bila dibandingkan dengan penyerapan anggaran sebesar 93% mengalami efisiensi sebesar 17%.

Capaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan indikator Predikat AKIP Satpol PP sebesar 100% bila dibandingkan dengan penyerapan anggaran sebesar 96% mengalami efisiensi sebesar 4% .

**Tabel 3.17**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Dibandingkan Dengan Capaian Kinerja**  
**Indikator Kinerja Program**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% Capaian	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
<i>1</i>	<i>2</i>		<i>6</i>	<i>7</i>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standard	100%	96%	4 %
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	146%	96%	50 %
	Persentase penegakan produk hukum daerah	100%	90%	10%

Capaian sasaran program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan indikator persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standard sebesar 100% bila dibandingkan dengan penyerapan anggaran sebesar 96% mengalami efisiensi sebesar 4%.

Capaian sasaran program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) sebesar 146% bila dibandingkan dengan penyerapan anggaran sebesar 96% mengalami efisiensi sebesar 50%.

Capaian sasaran program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator persentase penegakan produk hukum daerah sebesar 100% bila dibandingkan dengan penyerapan anggaran sebesar 90% mengalami efisiensi sebesar 10%.

**g. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian Kinerja**

Berikut disajikan tabel Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian Kinerja

**TABEL 3.18**  
**Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian Kinerja**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Predikat AKIP Satpol PP	B		Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standard	100%	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
							a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
							b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
							a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
							b. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut							

							Kelengkapannya
							b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
							Administrasi Umum Perangkat Daerah
							a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
							b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
							c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
							d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
							e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
							a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
							b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
							Penyediaan Jasa Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah
							c. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
							d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
							a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
							b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan

							Bangunan Lainnya
							c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Meningkatnya penyelesaian Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	Persentase Penurunan pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	5%	5,5%	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 ( Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	65%	95%	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum / Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
							Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
							a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
							b. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
							c. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
							d. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban umum
				Persentase penegakan produk hukum daerah	85%	85%	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota							
b. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota							



Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa :

1. Capaian sasaran meningkatnya penyelesaian ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) dengan indikator persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) dapat dicapai dengan dukungan Indikator Kinerja program persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar. Capaian indikator tersebut dapat dicapai dimana Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung beberapa kegiatan sebagai berikut :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja Persentase Dokumen Perencanaan dan laporan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar sebesar 100% dan didukung sub kegiatan :
    - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan capaian kinerja tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 2 dokumen;
    - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan capaian kinerja tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 7 Laporan.
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun secara standar sebesar 100% dan didukung sub kegiatan :
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian kinerja tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN selama 12 bulan.
  - c. Administrasi kepegawaian perangkat daerah, dengan capaian kinerja persentase administrasi kepegawaian yang sesuai kebutuhan dan didukung sub kegiatan :
    - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dengan capaian kinerja tersedianya pakaian dinas lapangan anggota Satpol PP beserta atribut kelengkapan sebanyak 112 stel.
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan capaian kinerja tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor;
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian kinerja tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan capaian kinerja tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan;
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan capaian kinerja Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian kinerja Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja persentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100% dan didukung sub kegiatan :
- Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan capaian kinerja tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya sebanyak 18 set;
  - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dengan capaian kinerja tersedianya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya 73 buah;
- f. Penyediaan Jasa Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian kinerja persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100% dan didukung sub kegiatan :
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian kinerja tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan;
  - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan capaian kinerja tersedianya jasa pelayanan umum kantor selama 12 bulan.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian kinerja persentase barang milik daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan sebesar 100% dan didukung sub kegiatan :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan capaian kinerja jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebanyak 10 unit;
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan capaian kinerja jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 1 unit;
  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan capaian kinerja jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi sebanyak 8 unit.
2. Capaian sasaran meningkatnya penyelesaian Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) dengan indikator persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) dapat dicapai dengan dukungan Indikator Kinerja program tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ( Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) dan Persentase penegakan produk hukum daerah. Capaian indikator tersebut dapat dicapai melalui Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan kegiatan sebagai berikut :
- a. Indikator kinerja program tingkat penyelesaian pelanggaran K3 ( Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) didukung Kegiatan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja

persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sebesar 95 % dan didukung beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan dengan capaian kinerja jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan sebanyak 110 kasus yang ditangani;
  2. Peningkatan kapasitas SDM satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia dengan capaian kinerja meningkatnya kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat sebanyak 125 orang anggota Satpol PP;
  3. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dengan capaian kinerja terlaksananya kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan dengan kecamatan, kelurahan, dan desa di Kabupaten Dairi.
  4. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum dengan capaian kinerja tersedianya sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum berupa 56 set pakaian anti huru-hara.
- b. Indikator kinerja program persentase penegakan produk hukum daerah didukung Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dengan pencapaian indikator kinerja persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebesar 85% dan didukung beberapa sub kegiatan sebagai berikut :
5. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dengan capaian kinerja terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi No. 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum di 11 kecamatan yaitu Kecamatan Lae Parira, Berampu, Gunung Sتمبر, Tigalingga, Sumbul, Silahisabungan, Parbuluan, Siempat Nempu Hilir, Silima Pungga-pungga, Siempat Nempu hulu dan Sidikalang dengan Jumlah Peserta 45 Orang per Kecamatan dan Jumlah Keseluruhan 495 Orang yang Peserta nya terdiri dari Perangkat Desa dan Linmas Desa ;
  6. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dengan capaian kinerja terlaksananya penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati antara lain Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB ) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Penertiban Ijin Usaha, Penertiban Reklame, Penertiban Menara Tower, Pendampingan Penagihan Pajak Daerah Bersama Tim dari Badan Pendapatan Derah di Kabupaten Dairi.

## B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022

Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi tetap menaati prinsip efisiensi dengan melaksanakan seluruh Program Kegiatan berdasarkan kebutuhan Daerah. Realisasi Anggaran Tahun 2022 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi secara menyeluruh dapat diperlihatkan pada tabel sebagai berikut :

**TABEL 3.19**  
**REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022**

<b>PROGRAM / KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.677.794.745	6.386.065.646	96%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	19.937.000	96%
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100%
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.174.213.018	2.997.308.268	94%
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.174.213.018	2.997.308.268	94%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.000.000	0	0%
a. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	10.000.000	0	0%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	176.810.000	145.210.000	82%
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	146.810.000	145.210.000	99%
b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30.000.000	-	0%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	<b>515.698.700</b>	<b>513.009.646</b>	<b>99%</b>
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.457.900	4.457.900	100%
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	82.733.400	82.712.300	99%
c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.569.400	6.569.400	100%
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.680.000	7.330.000	95%
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	414.258.000	411.940.046	99%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<b>46.820.000</b>	<b>46.820.000</b>	<b>100%</b>
a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.320.000	10.320.000	100%

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	36.500.000	36.500.000	100%
<b>Penyediaan Jasa Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2.535.257.484</b>	2.471.909.840	98%
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.500.000	13.864.400	84%
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.518.757.484	2.471.909.840	98%
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>198.995.543</b>	<b>191.870.892</b>	<b>96%</b>
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	173.585.543	<b>166.465.892</b>	<b>96%</b>
b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.340.000	20.335.000	96%
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.070.000	5.070.000	100%
Program Ketentraman dan Ketertiban Umum / Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.401.103.800	1.278.187.900	93%
<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>905.993.300</b>	830.964.400	96%
a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	504.452.500	435.069.600	86%
b. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	199.999.950	195.791.950	98%
c. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	52.242.850	51.992.850	99%
d. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban umum	149.298.000	148.110.000	99%
<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota</b>	495.110.500	447.223.500	90%
a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	119.999.700	108.971.200	91%
b. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	375.110.800	338.252.300	90%

## BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi merupakan perwujudan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi untuk mempertanggungjawabkan kinerja sebagai perwujudan pelaksanaan misi organisasi dalam capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Telah disampaikan uraian tentang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi sebagai salah satu unsur Penyelenggara Pemerintah Negara dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang ada. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi lebih mampu memanfaatkan potensi dan peluang serta dapat mengatasi kendala yang dihadapi dalam mencapai visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Dairi agar lebih mampu menjawab tuntutan lingkungan baik lokal, nasional maupun global.

Laporan ini juga sebagai sarana evaluasi bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi. Berbagai kendala yang akan dihadapi dalam menjalankan kegiatan, program maupun kebijakan pada tahun mendatang dapat dicarikan solusinya dengan bercermin pada berbagai keberhasilan maupun kegagalan yang sudah dihadapi dalam tahun 2022.

Demikianlah Laporan ini disusun dan diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP ini dapat mendorong pelaksanaan program /kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi yang lebih baik sehingga akan terwujudnya peningkatan hasil kinerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan.

Sidikalang, 30 Januari 2023

  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN DAIRI,  
Drs. JUNIHARDI D.R. SIREGAR, MM  
REMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 196906031990091001